

Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Dompu

Deswita^{1*}, Samsudin², Firmansyah³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

Email: deswita980@gmail.com¹, daesamsoro@gmail.com², firmansyah@stieyapisdomp.ac.id³

*Penulis Korespondensi: deswita980@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of inflation and the unemployment rate on community welfare, both directly and through the mediating role of the Human Development Index (HDI), among the working-age population in Dompu Regency. A quantitative approach with an explanatory design was employed, involving 97 respondents selected through purposive sampling based on the Lemeshow formula. Primary data were collected through a Likert-scale questionnaire and field observation, then analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS software. The results show that inflation has a significant positive effect on community welfare but not on HDI, while the unemployment rate is the most dominant determinant, exerting a large effect on both community welfare and HDI. In contrast, HDI does not significantly affect community welfare and fails to mediate the effects of either inflation or unemployment on welfare. The research model explains 76.5% of the variance in community welfare and 63.7% of the variance in HDI. These findings confirm that directly addressing employment issues should be the foremost priority in efforts to improve community welfare in Dompu Regency, rather than relying on human development achievements as an intervening pathway.*

Keywords: *Human Development Index; Inflation; Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM); Social Welfare; Unemployment Rate.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan tingkat pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui peran mediasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada masyarakat usia produktif di Kabupaten Dompu. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori, melibatkan 97 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan Rumus Lemeshow. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan observasi lapangan, kemudian dianalisis menggunakan metode *Partial Least Squares–Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat namun tidak terhadap IPM, sedangkan tingkat pengangguran terbukti menjadi determinan paling dominan dengan pengaruh besar (*large effect*) terhadap kesejahteraan masyarakat maupun IPM. Di sisi lain, IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak terbukti memediasi pengaruh inflasi maupun pengangguran terhadap kesejahteraan. Model penelitian mampu menjelaskan variasi kesejahteraan masyarakat sebesar 76,5% dan variasi IPM sebesar 63,7%. Temuan ini menegaskan bahwa penanganan persoalan ketenagakerjaan secara langsung merupakan prioritas utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dompu, dibandingkan dengan mengandalkan capaian pembangunan manusia sebagai jalur antara.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia; Inflasi; Kesejahteraan Masyarakat; *Partial Least Squares–Structural Equation Modeling* (PLS-SEM); Tingkat Pengangguran.

1. LATAR BELAKANG

Kondisi pembangunan ekonomi daerah secara umum mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai indikator makroekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Inflasi yang tinggi berpotensi menekan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya hidup, sedangkan tingkat pengangguran yang tinggi menandakan rendahnya penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian. Menurut teori pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat tidak hanya

bergantung pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada stabilitas harga dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Berbagai studi dalam lima tahun terakhir ini mengonfirmasi bahwa inflasi dan pengangguran secara signifikan memengaruhi kesejahteraan masyarakat serta kualitas pembangunan manusia (Sari & Nugroho, 2021; Pratama et al., 2022; Lestari, 2023). Selain itu, IPM sering digunakan sebagai indikator komprehensif untuk menjelaskan keterkaitan antara faktor ekonomi dan kesejahteraan (Hidayat & Rahman, 2020; Putri & Kurniawan, 2024).

Kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama pembangunan, yang menunjukkan tingkat kualitas hidup yang layak dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Secara umum, tingkat kesejahteraan di berbagai daerah menunjukkan variasi yang terus berubah, termasuk di Kabupaten Dompu. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dompu menunjukkan adanya tren penurunan kesejahteraan dalam sepuluh tahun terakhir, mulai dari 14,23 pada tahun 2016 hingga 11,15 pada tahun 2025. Angka tersebut mencakup tahun-tahun berikut: (2016: 14,23; 2017: 13,43; 2018: 12,4; 2019: 12,25; 2020: 12,16; 2021: 12,6; 2022: 12,4; 2023: 12,62; 2024: 11,59; 2025: 11,15). Tren ini menunjukkan adanya kesulitan dalam membangun ekonomi daerah yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Beberapa penelitian menghubungkan penurunan tersebut dengan naiknya inflasi dan tingkat pengangguran yang memperlambat penyebaran pendapatan (Wibowo et al., 2022; Ramadhan & Putra, 2023). Data BPS Kabupaten Dompu menunjukkan bahwa perubahan ekonomi daerah mempunyai dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Inflasi adalah salah satu faktor penting dalam perekonomian yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu. Inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli turun, terutama bagi orang yang penghasilannya rendah, sehingga mengganggu tingkat kesejahteraan mereka. Di tingkat daerah, inflasi sering terjadi karena harga bahan pokok tidak stabil, gangguan dalam pengiriman barang, serta faktor dari luar negeri atau kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat karena mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Saputra & Dewi, 2021; Yuliana et al., 2024). Inflasi yang tidak terkendali juga menghambat perkembangan manusia, karena masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan (Firmansyah & Aini, 2022; Kurniawati, 2023). Maka itu, mengendalikan inflasi sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat tetap stabil. Faktor yang menyebabkan masalah dalam penelitian ini adalah inflasi dan tingkat pengangguran sebagai variabel independen, sedangkan IPM berperan sebagai variabel intervensi. Inflasi yang tidak stabil membuat

pengeluaran masyarakat berkurang, sementara tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan kurangnya kesempatan kerja yang berdampak pada pendapatan orang-orang. IPM bertindak sebagai jembatan yang menjelaskan bagaimana kedua variabel tersebut memengaruhi tingkat kesejahteraan. Penelitian menyebutkan bahwa peningkatan Indeks Pemerintahan Manusia (IPM) dapat memperkuat dampak positif dari pembangunan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat (Andini et al., 2020; Fauzi & Hasan, 2021). Penelitian lainnya juga memperkuat bahwa kualitas pembangunan manusia berperan sebagai mediasi dalam hubungan antara inflasi, pengangguran, dan tingkat kesejahteraan (Rizky & Maulana, 2022; Ningsih et al., 2024).

Selain inflasi, tingkat pengangguran merupakan faktor penting yang secara langsung memutus rantai pendapatan rumah tangga dan menekan angka kesejahteraan. Dalam lima tahun terakhir, dinamika ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk di tingkat daerah, mengalami fluktuasi yang signifikan akibat guncangan pandemi COVID-19 yang mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan angka pengangguran terbuka nasional menyentuh 7,07% (BPS, 2020). Meskipun tren pasca-pandemi menunjukkan pemulihan yang konsisten di mana angka pengangguran mulai melandai ke level 5,86% pada 2022 hingga mencapai kisaran 4,76% pada awal 2025 masalah disparitas penyerapan tenaga kerja di sektor formal masih menjadi tantangan besar bagi daerah seperti Kabupaten Dompu. Tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan per kapita, tetapi juga memicu masalah sosial yang menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian yang menegaskan bahwa pengangguran memiliki korelasi negatif yang kuat terhadap tingkat kesejahteraan, di mana kegagalan pasar tenaga kerja akan memperburuk akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan (Prasetyo & Utami, 2022; Wijaya et al., 2024; Tan et al., 2025).

Urgensi penelitian ini muncul karena perlunya memahami hubungan antara inflasi, tingkat pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat melalui IPM, terutama di Kabupaten Dompu. Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas hubungan antarvariabel tersebut, masih ada ruang untuk penelitian lebih lanjut, khususnya dalam penerapan IPM sebagai variabel perantara di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membuka dampak dari inflasi dan tingkat pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan peran IPM di Kabupaten Dompu. Hasilnya diharapkan bisa membantu dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang lebih baik, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putra & Sari, 2023; Lestari & Hidayat, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga secara masif dan terus-menerus yang melemahkan daya beli masyarakat, dipicu oleh tingginya permintaan, biaya produksi, serta dinamika global (Pujadi, 2022). Riyono et al. (2022) mengklasifikasikan inflasi berdasarkan laju tahunannya menjadi ringan (di bawah 10%), sedang (10%–30%), tinggi (30%–100%), dan hiperinflasi (di atas 100%) sebagai acuan kebijakan stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi sangat krusial bagi stabilitas makroekonomi, kesejahteraan publik, dan investasi (Martanto et al., 2021), serta memengaruhi stabilitas PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah (Muslimah & Indrawati, 2022). Namun, selama tetap terkendali, inflasi dapat menjadi stimulan pertumbuhan melalui kenaikan harga yang mendorong pengusaha memperluas volume produksi (Simanungkalit, 2020). Untuk itu, penelitian ini menggunakan 4 indikator yang dikemukakan oleh Jancen Roland Patty (2026), yaitu: (1) Indeks Harga Konsumen (IHK), (2) Penyesuaian pola belanja, (3) Kewaspadaan finansial, dan (4) Strategi adaptasi konsumen.

Tingkat Pengangguran

Menurut Alam et al., (2023) tingkat pengangguran merupakan indikator fundamental yang mencerminkan beban ketenagakerjaan akibat fluktuasi ekonomi global yang membatasi penyerapan tenaga kerja. Angka pengangguran ini menjadi cerminan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menyelaraskan kompetensi pelamar dengan kebutuhan lowongan kerja (Arsyad & Ahmad, 2024), sekaligus menunjukkan kegagalan optimalisasi SDM jika rasio pencari kerja terhadap total angkatan kerja terlalu tinggi (Pratama & Wijaya, 2022). Di era modern, fenomena ini bergeser menjadi masalah struktural akibat digitalisasi yang memicu ketidaksesuaian kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan industri kreatif (Sari & Hidayat, 2025). Guna mengevaluasi daya serap sistem ekonomi, Badan Pusat Statistik (2026) mencakup kelompok usia produktif yang belum aktif bekerja baik yang sedang mencari kerja, merintis usaha, maupun yang pesimis ke dalam ruang lingkup pengangguran. Kajian ini mengadopsi tiga indikator Sukirno dalam Pamungkas & Kartika, (2025) yaitu: (1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), (2) jumlah angkatan kerja, dan (3) pemanfaatan tenaga kerja.

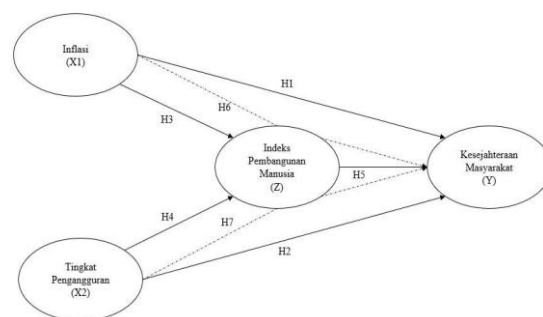
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (2026), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur untuk mengevaluasi standar hidup masyarakat dari dimensi fisik dan intelektual melalui tiga pilar utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli. Selaras dengan itu, indeks ini menjadi parameter keberhasilan distribusi pembangunan dalam menaikkan mutu kehidupan serta aksesibilitas terhadap pelayanan dasar (Hidayat & Saputra,

2024), sekaligus penanda kemajuan yang berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia demi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Wulandari et al., 2023). Dari perspektif kontemporer, tingkat IPM mencerminkan perluasan kesempatan hidup individu yang ditopang oleh tingkat edukasi dan derajat kesehatan yang baik (Fahmi, 2025), serta merepresentasikan kesuksesan peningkatan kualitas manusia berdasarkan ekspektasi umur dan kompetensi intelektual demi pemerataan kesejahteraan (Prasetyo & Utami, 2022). Guna mengukur variabel tersebut, penelitian ini mengadopsi empat indikator standar UNDP (1990) dalam Fahrurrozi et al., (2023), yang terdiri atas: (1) Angka Harapan Hidup (AHH), (2) Harapan Lama Sekolah (HLS), (3) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan (4) Pengeluaran.

Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Ramadhan & Pratama (2023), kesejahteraan diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari stabilitas ekonomi rumah tangga dan pemerataan akses fasilitas publik. Kondisi ini mencerminkan kepuasan hidup berdasarkan keseimbangan pendapatan riil dengan standar hidup (Sari et al., 2024), serta menjadi tujuan utama pembangunan daerah dalam menekan kemiskinan dan mendongkrak indeks kebahagiaan (Lestari & Wijaya, 2025). Badan Pusat Statistik (2026) menilai kesejahteraan sebagai fenomena multidimensi yang mencakup kecukupan konsumsi material sekaligus aspek non-material seperti rasa aman dan kesehatan, yang memperlihatkan kecakapan warga dalam mengelola sumber daya ekonomi demi kualitas hidup berkelanjutan (Hidayat, 2022). Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini mengukur tingkat kesejahteraan menggunakan pendekatan multidimensi yang merujuk pada tiga indikator Todaro & Smith dalam Fatimah et al., (2021), yaitu: (1) tingkat kesehatan, (2) tingkat pendidikan, dan (3) standar hidup layak.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian:

H1: Inflasi berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

H2: Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

H3: Inflasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H4: Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H5: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

H6: Indeks Pembangunan Manusia memediasi pengaruh Inflasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

H7: Indeks Pembangunan Manusia memediasi pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori yang berlokasi di Kabupaten Dompu. Populasi dalam studi ini mencakup seluruh penduduk usia produktif (15–65 tahun) di wilayah tersebut. Mengingat jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti, penentuan ukuran sampel dilakukan menggunakan Rumus Lemeshow (1990), yaitu: $n = (Z^2 \times P \times (1 - P)) / d^2$ Dalam perhitungan ini, peneliti menggunakan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) sehingga menghasilkan nilai skor Z sebesar 1,96 pada tingkat kepercayaan 95%. Estimasi proporsi populasi (P) ditetapkan sebesar 0,5 untuk memperoleh varians maksimal, serta batas toleransi kesalahan (limit of error) sebesar 0,10. Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh perhitungan sebagai berikut: $n = (1,96^2 \times 0,5 \times (1 - 0,5)) / (0,10^2)$ $n = (3,8416 \times 0,25) / 0,01$ $n = 0,9604 / 0,01 = 96,04 \approx 97 \text{ responden}$ Dengan mempertimbangkan potensi drop-out rate sebesar 10% guna mengantisipasi kemungkinan kuesioner yang tidak kembali, pengisian yang tidak lengkap, maupun data yang tidak dapat digunakan selama proses pengumpulan di lapangan. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui prosedur purposive sampling dengan kriteria inklusi sebagai berikut: 1) Warga yang berdomisili tetap dan memiliki identitas kependudukan (KTP/KK) di Kabupaten Dompu; 2) Berada dalam rentang usia produktif 15–65 tahun; serta 3) Memiliki aktivitas ekonomi aktif, baik sebagai pekerja, pelaku usaha, maupun pencari kerja di wilayah Kabupaten Dompu.

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis *Partial Least Squares–Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS 3.0 untuk membedah data. Pemilihan metode ini didasari kemampuannya dalam memetakan korelasi antarvariabel, baik yang bersifat langsung maupun mediasi. Prosedur pengujian dimulai dengan Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) guna menjamin kualitas instrumen. Parameter yang digunakan mencakup *Convergent Validity* (syarat *loading factor* > 0,70 dan AVE > 0,50), *Discriminant Validity* (melalui kriteria Fornell-Larcker, *cross loadings*, atau HTMT < 0,90), serta konsistensi internal via *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* > 0,70. Selanjutnya, Evaluasi Model Struktural (Inner Model) dilakukan untuk pembuktian hipotesis dengan mengamati nilai R2

(coefficient of determination), Q2 (predictive relevance), f2 (effect size), serta signifikansi jalur melalui *T-Statistics* > 1,96 dan *P-Value* < 0,05.

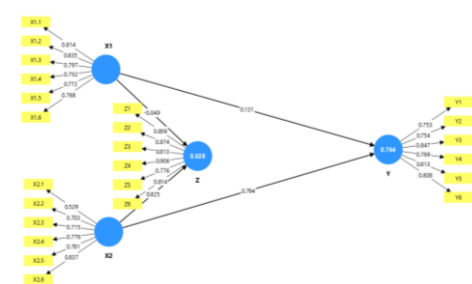
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi(f)	Persentase %
Jenis Kelamin	Laki-laki	53	54.64%
	Perempuan	44	45.36%
Usia	15-30 tahun	32	32.99%
	31-50 tahun	45	46.39%
	50-65 tahun	20	20.62%
	SD	10	10.31%
Pendidikan Terakhir	SMP	10	10.31%
	SMA	51	52.58%
	D3	2	2.06%
	S1	23	23.71%
	S2/S3	1	1.03%
	Petani	32	32.99%
Pekerjaan	Wiraswasta	24	24.74%
	Guru	12	12.37%
	Pegawai swasta	9	9.28%
	Pegawai BUMN	8	8.25%
	PNS/TNI/Polri	5	5.15%
	Lainnya	7	7.22%
Total		97	100.00%

Sumber Peneliti (2026).

Merujuk pada tabel 1 sebagian besar dari 97 responden yang terlibat berjenis kelamin laki-laki (54,64%) dan berada pada fase usia produktif antara 31 sampai 50 tahun (46,39%). Pada aspek edukasi, jenjang SMA menjadi latar belakang yang paling banyak ditemui dengan porsi mencapai 52,58%. Mengenai mata pencaharian, komposisi terbesar diisi oleh masyarakat yang bergerak di bidang tani (32,99%) serta sektor wirausaha (24,74%). Kombinasi data tersebut mengindikasikan bahwa subjek penelitian ini secara umum diwakili oleh kaum pria dewasa dengan latar belakang pendidikan tingkat menengah yang berprofesi di sektor agraris maupun perdagangan.



Gambar 2. Measurement Model (outer model)

Sumber: Hasil analisis data (2026)

Table 2. *Measurement Model (Outer Model)* Hasil

Variabel	Indikator	Instrumen	Outer loadings	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Inflasi	Indeks Harga Konsumen	X1.1	0.814	0.879	0.909	0.624
		X1.2	0.835			
		X1.3	0.797			
	Pola Belanja Kewaspadaan Finansial	X1.4	0.752			
		X1.5	0.772			
		X1.6	0.768			
Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	X2.1	0.529	0.822	0.871	0.533
		X2.2	0.703			
		X2.3	0.715			
	Jumlah Pencari Kerja	X2.4	0.776			
		X2.5	0.781			
		X2.6	0.837			
Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kesehatan	Y1	0.753	0.880	0.909	0.626
		Y2	0.754			
		Y3	0.847			
	Tingkat Pendidikan	Y4	0.769			
		Y5	0.813			
		Y6	0.808			
Indeks Pembangunan Manusia	Standar hidup layak	Z1	0.859	0.917	0.936	0.708
		Z2	0.874			
		Z3	0.813			
	Angka Harapan Hidup	Z4	0.906			
		Z5	0.776			
		Z6	0.814			

Sumber. Hasil analisis data (2026).

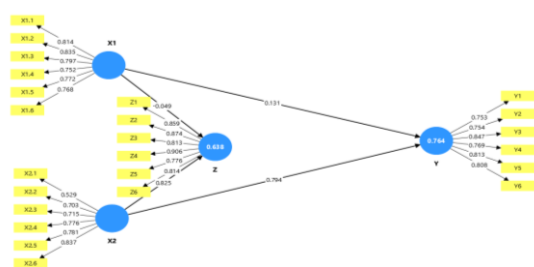
Berdasarkan evaluasi model pengukuran yang tersaji pada Tabel 2, instrumen yang digunakan untuk seluruh variabel penelitian meliputi Inflasi, Tingkat Pengangguran, Kesejahteraan Masyarakat, serta Indeks Pembangunan Manusia dinyatakan memiliki mutu data yang sangat memadai. Kriteria validitas terpenuhi dengan baik, di mana seluruh indikator memiliki koefisien *Outer Loadings* di atas nilai ambang batas 0,50, tepatnya pada rentang 0,529 sampai 0,906. Hal ini diperkuat oleh perolehan *Average Variance Extracted* (AVE) dari tiap variabel yang berada pada kisaran 0,533 hingga 0,708, memenuhi syarat minimum 0,50. Di sisi lain, konsistensi internal instrumen ini tergolong sangat tinggi karena nilai *Cronbach's Alpha* (0,822–0,917) beserta *Composite Reliability* (0,871–0,936) sukses melampaui batas standar 0,70.

Tabel 3. Discriminant Validity (Fornell Lacker)

Variabel	Inflasi	Tingkat Pengangguran	Kesejahteraan Masyarakat	IPM
Inflasi	0.790			
Tingkat Pengangguran	0.555	0.730		
Kesejahteraan Masyarakat	0.572	0.868	0.791	
IPM	0.408	0.797	0.700	0.841

Sumber. Hasil analisis data (2026).

Merujuk pada data uji *Fornell-Larcker Criterion* yang disajikan pada Tabel 3, model pengujian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan yang dipersyaratkan. Ketepatan ini didasarkan pada perolehan nilai akar kuadrat AVE pada garis diagonal setiap variabel, dengan rincian Inflasi X1 sebesar 0,790, Tingkat PengangguranX2 sebesar 0,730, Kesejahteraan Masyarakat Y sebesar 0,791, dan Indeks Pembangunan Manusia Z sebesar 0,841. Seluruh angka tersebut terbukti melampaui nilai korelasi linier dengan konstruk lainnya pada kolom yang sama. Dengan demikian, dapat dikonfirmasi bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini bersifat empiris secara mandiri dan memiliki pembeda yang nyata satu sama lain.

**Gambar 3.** Model Struktural (InnerModel)

Sumber: Hasil Analisis Data, (2026)

Tabel 4. Hasil Uji R-Square

Variabel	R-square	R-square adjusted	Kriteria
Kesejahteraan Masyarakat	0.765	0.757	Kuat
IPM	0.637	0.629	Moderat

Sumber. Hasil analisis data (2026)

Melalui data pengujian *R-Square* pada Tabel 4, tingkat kemampuan prediktif model terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) berada pada kategori kokoh dengan nilai 0,765. Proporsi ini menegaskan bahwa daya penjelas dari himpunan variabel eksogen terhadap Kesejahteraan Masyarakat mencapai 76,5%, dan fenomena sisa sebesar 23,5% dijumpai oleh faktor-faktor luar. Sebaliknya, parameter Indeks Pembangunan Manusia (Z) menghasilkan koefisien determinasi sebesar 0,637 yang tergolong moderat. Dengan kata lain, model struktural ini mampu mengadopsi 63,7% variasi pada Indeks Pembangunan Manusia,

sementara defisit sebesar 36,3% merupakan representasi dari variabel bebas lain yang tidak ikut dianalisis.

Tabel 5. Hasil Uji *Effect size* (F^2)

Tingkat Pengaruh Antar Variabel	F-Square	Description
X1 -> Y	0.051	<i>Small</i>
X1 -> Z	0.004	<i>No Effect</i>
X2 -> Y	0.755	<i>Large</i>
X2 -> Z	1.293	<i>Large</i>
Z -> Y	0.002	<i>No Effect</i>

Sumber: Hasil analisis data (2026)

Melalui hasil analisis nilai f^2 pada Tabel 5, terlihat adanya perbedaan kontribusi yang kontras antarvariabel independen. Tingkat Pengangguran (X2) terbukti membawa dampak yang masif (*large*) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Y ($f^2 = 0,755$) dan Indeks Pembangunan Manusia Z ($f^2 = 1,293$). Di pihak lain, daya pengaruh Inflasi (X1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Y berada pada level yang minor (*small*) dengan nilai $f^2 = 0,051$. Sementara itu, interaksi pada jalur X1 $\rightarrow$ Z (Inflasi ke Indeks Pembangunan Manusia) serta jalur Z $\rightarrow$ Y (Indeks Pembangunan Manusia ke Kesejahteraan Masyarakat) dinyatakan tidak berdampak (*no effect*) karena besaran nilai f^2 yang dihasilkan gagal memenuhi batas minimal 0,02.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis (Path Coefficients & Specific Indirect Effects)

Hubungan Antar Variabel	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values	Keterangan Hipotesis
Pengaruh Tidak Langsung				
X1 -> Y	0.132	2.515	0.012	Diterima
X1 -> Z	-0.049	0.591	0.554	Ditolak
X2 -> Y	0.766	8.865	0.000	Diterima
X2 -> Z	0.824	14.295	0.000	Diterima
Z -> Y	0.035	0.423	0.672	Ditolak
Pengaruh Tidak Langsung				
X1 -> Z -> Y	-0.002	0.195	0.845	Ditolak
X2 -> Z -> Y	0.029	0.419	0.676	Ditolak

Sumber: Hasil analisis data (2026)

Melalui hasil uji statistik di Tabel 6, dari total tujuh jalur yang diestimasi, konfirmasi signifikansi hanya diperoleh pada tiga hubungan langsung yang mencatatkan *T-statistics* di atas 1,96 dan *P-values* di bawah 0,05. Ketiga jalur tersebut adalah pengaruh Inflasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat (X1 $\rightarrow$ Y), Pengangguran terhadap Kesejahteraan Masyarakat (X2 $\rightarrow$ Y), serta Pengangguran terhadap IPM (X2 $\rightarrow$ Z). Pola sebaliknya terjadi pada hubungan langsung Inflasi terhadap IPM (X1 $\rightarrow$ Z) dan pengaruh IPM terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Z $\rightarrow$ Y) yang dinyatakan tidak diterima. Lebih lanjut, pengujian terhadap dampak tidak

langsung membuktikan bahwa seluruh hipotesis mediasi ditolak, baik pada jalur $X1 \rightarrow Z \rightarrow Y$ maupun $X2 \rightarrow Z \rightarrow Y$. Angka-angka tersebut membuktikan secara empiris bahwa Indeks Pembangunan Manusia (Z) tidak mampu menjalankan perannya sebagai variabel penyalur (mediasi) dalam model struktural yang dibangun.

Pembahasan

Pengaruh Inflasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pemodelan struktural membuktikan bahwa inflasi memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Dompu, namun tidak berdampak bermakna pada Indeks Pembangunan Manusia. Pengaruh positif ini mengindikasikan terjadinya *demand-pull inflation*, yaitu kenaikan harga yang dipicu oleh lonjakan daya beli dan geliat ekonomi masyarakat pada sektor komoditas pertanian unggulan. Fenomena tersebut sejalan dengan argumen Prasetyo & Utama, (2022) bahwa inflasi yang terkendali dapat menstimulus produsen lokal untuk memacu volume produksi, sehingga mampu mendorong pendapatan rumah tangga.

Di sisi lain, tidak adanya pengaruh inflasi terhadap nilai IPM mengonfirmasi pandangan Wahyudi et al., (2023) bahwa fluktuasi harga jangka pendek tidak secara otomatis mengganggu fokus masyarakat terhadap pemenuhan sektor pendidikan maupun kesehatan. Hal ini dikarenakan kedua aspek esensial tersebut lebih dominan dipengaruhi oleh konsistensi alokasi anggaran belanja publik serta program jaminan sosial yang digulirkan oleh pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia

Temuan empiris dalam riset ini menegaskan bahwa Tingkat Pengangguran memegang peran yang paling krusial sekaligus menjadi faktor determinan yang paling dominan dalam konstelasi ekonomi makro di Kabupaten Dompu. Pengangguran terbukti memberikan dampak yang masif (*large effect*), baik dalam menurunkan derajat Kesejahteraan Masyarakat maupun dalam mengontrol Indeks Pembangunan Manusia. Tingginya nilai koefisien pengaruh pengangguran terhadap tingkat kesejahteraan mencerminkan realitas empiris di lapangan bahwa minimnya ketersediaan lapangan kerja formal secara instan memutus sumber pendapatan utama keluarga.

Fenomena ini sejalan dengan kajian Saputra & Rahmawati, (2024) yang menyatakan bahwa pengangguran merupakan akar masalah utama yang paling cepat menggerus standar kehidupan layak masyarakat di tingkat regional pada era pasca-pandemi. Lebih lanjut, kuatnya interaksi antara pengangguran dan IPM memperkuat analisis Hidayat & Siregar, (2021) bahwa

meluasnya angka pengangguran melemahkan kapasitas finansial rumah tangga dalam mengalokasikan pendanaan untuk pendidikan tingkat lanjut ataupun pemenuhan gizi kesehatan yang bermutu. Dampaknya, angka rata-rata lama sekolah serta derajat kesehatan masyarakat menjadi stagnan, sekaligus mengonfirmasi berlakunya Hukum Okun secara parsial di tingkat daerah.

Eksplorasi Kegagalan Peran Mediasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Satu temuan penting yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah ditolaknyanya eksistensi Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel antara (*mediating variable*) yang menjembatani pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara metodologis, tidak adanya efek mediasi ini membuktikan bahwa transmisi dampak dari guncangan pasar tenaga kerja (pengangguran) serta ketidakstabilan harga (inflasi) bertransmisi secara langsung (*direct drive*) terhadap kapasitas daya beli riil masyarakat di lapangan.

Riset pendukung dari Lestari et al., (2025) memperjelas fenomena ini dengan memaparkan bahwa masyarakat di daerah berkembang merasakan dampak guncangan ekonomi secara instan pada pola konsumsi harian mereka, tanpa harus menunggu pergeseran nilai kalkulasi IPM yang secara administratif bersifat akumulatif dan bergerak lambat. Di samping itu, tidak optimalnya peran mediasi IPM ini mengindikasikan adanya gejala *mismatch* struktural di Kabupaten Dompu. Sebagaimana diungkapkan oleh Ramadhan & Wardani, (2023) peningkatan kualitas modal manusia (pendidikan) sering kali tidak selaras dengan perbaikan kesejahteraan nyata apabila struktur pasar tenaga kerja lokal gagal menyediakan sektor formal yang memadai untuk menyerap angkatan kerja berpendidikan tersebut.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Selain berperan sebagai variabel mediasi, jalur pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kesejahteraan Masyarakat juga teruji tidak signifikan secara statistik, sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 0,035 dengan nilai T-statistics 0,423 dan P-value 0,672, sehingga hipotesis kelima (H5) dinyatakan ditolak. Temuan ini diperkuat oleh nilai f^2 sebesar 0,002 yang dikategorikan tidak memiliki pengaruh (*“no effect”*) terhadap kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan capaian IPM di Kabupaten Dompu, yang merupakan akumulasi dari indikator angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita, belum secara otomatis berkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan riil yang dirasakan masyarakat dalam jangka pendek.

Fenomena ini sejalan dengan catatan Zulkarnain, (2023) yang menyoroti bahwa capaian angka harapan hidup serta pembangunan manusia di wilayah Nusa Tenggara Barat masih bergerak secara gradual dan bersifat struktural, sehingga perubahannya tidak serta-merta tercermin pada kondisi kesejahteraan ekonomi rumah tangga dalam periode pengamatan yang relatif singkat. Sejalan dengan itu, Bustamam et al., (2021) juga menemukan bahwa indikator kesejahteraan masyarakat lebih banyak ditentukan oleh faktor pendapatan langsung dan akses pekerjaan dibandingkan capaian indeks pembangunan manusia secara agregat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Dompu, IPM lebih tepat dipandang sebagai indikator hasil pembangunan jangka panjang (*lagging indicator*) ketimbang sebagai pengungkit langsung (*direct driver*) bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil atau analisis diatas dapat di simpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (H1 diterima), tetapi tidak berdampak pada IPM (H3 ditolak). Sebaliknya, Tingkat Pengangguran menjadi faktor penentu paling dominan dengan dampak masif (*large effect*) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (H2 diterima) dan IPM (H4 diterima). Sementara itu, IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (H5 ditolak) serta gagal memediasi pengaruh inflasi (H6 ditolak) maupun pengangguran (H7 ditolak). Secara simultan, model ini mampu menerangkan variasi Kesejahteraan Masyarakat sebesar 76,5% (kriteria kuat) dan IPM sebesar 63,7% (kriteria moderat). Hal ini menegaskan bahwa penekanan angka pengangguran adalah solusi paling mendesak demi mendongkrak kesejahteraan lokal, sedangkan pengendalian inflasi berfungsi sebagai pelengkap, dan pembangunan IPM merupakan investasi jangka panjang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu disarankan untuk memprioritaskan pembukaan lapangan kerja formal melalui hilirisasi pertanian, penguatan UMKM, dan pelatihan vokasi yang sesuai pasar lokal guna menekan pengangguran. Selain itu, stabilitas harga pangan wajib dijaga lewat operasi pasar dan pengawasan jalur distribusi demi mengamankan daya beli warga. Sektor pendidikan serta kesehatan dalam IPM juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja agar dampaknya langsung menyentuh ekonomi rumah tangga. Terakhir, peneliti selanjutnya diharapkan memperluas cakupan wilayah, menambah variabel makro (seperti kemiskinan atau PDRB), serta menggunakan metode data panel untuk mendeteksi potensi efek tunda (*lag effect*) IPM terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, S., dkk. (2023). Analisis makroekonomi dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja di era pasca pandemi. *Jurnal Ekonomi Ketenagakerjaan*, 11(2).
- Arsyad, M., & Ahmad, F. (2024). Kebijakan stimulus pemerintah dalam menekan angka pengangguran melalui pengembangan kompetensi. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Laporan Indeks Pembangunan Manusia dan indikator kesejahteraan rakyat 2026*. Badan Pusat Statistik.
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indikator kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(1), 85–92. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/7677>
- Fahmi, I. (2025). *Manajemen modal manusia dan kapabilitas individu di era digital*. Alfabeta.
- Fahrurrozi, M., Mohzana, Haritani, H., Yunitasari, D., & Basri, H. (2023). Peningkatan indeks pembangunan manusia.
- Fauzi, A., & Hasan, M. (2021). Analisis hubungan indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(1), 45–56.
- Firmansyah, D., & Aini, N. (2022). Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 67–78.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Hidayat, A., & Saputra, R. (2024). Evaluasi pemerataan pembangunan dan akses layanan dasar di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31790>
- Hidayat, R., & Rahman, A. (2020). Peran pembangunan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 89–102.
- Hidayat, R., & Siregar, M. A. (2021). Analisis dampak pengangguran terhadap kualitas modal manusia dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145–158.
- Kurniawati, I. (2023). Analisis pengaruh inflasi dan pembangunan manusia terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 19(2), 150–162. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v1i2.393>
- Lestari, D. (2023). Dampak inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Nasional*, 11(3), 201–213.
- Lestari, D., & Hidayat, T. (2025). Pengaruh faktor ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. *Jurnal Pembangunan Regional*, 7(1), 33–47.
- Lestari, P., & Wijaya, K. (2025). Indeks kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi regional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Lestari, S., Handoko, T., & Nugroho, A. (2025). Transmisi langsung guncangan makroekonomi terhadap konsumsi rumah tangga di sektor domestik. *Jurnal Ekonomi Regional*, 19(1), 22–37.

- Martanto, dkk. (2021). Sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas harga. *Jurnal Riset Ekonomi*.
- Muslimah, S., & Indrawati, T. (2022). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan PDRB daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Ningsih, S., Putra, R., & Wahyuni, E. (2024). Peran pembangunan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 15(1), 77–90.
- Patty, J. R. (2026). Analisis pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat. *Journal of Innovative and*.
- Prasetyo, P. E., & Utama, M. S. (2022). Demand-pull inflation dan stimulus produksi daerah: Pendekatan ekonomi Keynesian kontemporer. *Ekonomika: Jurnal Teori dan Terapan*, 33(3), 289–302.
- Pratama, A., Wijaya, H., & Saputra, D. (2022). Analisis pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 134–145.
- Pratama, R., & Wijaya, A. (2022). Inefisiensi sumber daya manusia dan rasio pengangguran di Indonesia. *Ekonomi Kontemporer*.
- Pujadi. (2022). *Pengantar ekonomi makro: Teori inflasi dan daya beli*. Erlangga.
- Putra, Y., & Sari, M. (2023). Pengaruh pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 55–68. <https://doi.org/10.24036/jkep.v5i2.14852>
- Putri, L., & Kurniawan, F. (2024). Indeks pembangunan manusia dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 12(2), 98–110.
- Ramadhan, A. F., & Wardani, K. (2023). Fenomena educational mismatch dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah berkembang. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah*, 8(2), 112–126.
- Ramadhan, F., & Putra, A. (2023). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Makro*, 8(2), 120–132.
- Ramadhan, G., & Pratama, M. (2023). Stabilitas ekonomi rumah tangga dan akses fasilitas publik. *Jurnal SosioEkonomi*.
- Riyono, dkk. (2022). Forecasting laju inflasi Indonesia menggunakan rantai Markov. <https://doi.org/10.24014/jsms.v8i1.14767>
- Rizky, M., & Maulana, A. (2022). Analisis mediasi indeks pembangunan manusia dalam hubungan ekonomi dan kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 88–99.
- Saputra, D., & Rahmawati, E. (2024). Volatilitas pasar tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi: Studi kasus kabupaten/kota di Nusa Tenggara. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 6(1), 45–59.
- Saputra, E., & Dewi, R. (2021). Pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(2), 140–152.
- Sari, D., & Hidayat, T. (2025). Transformasi digital dan tantangan struktural ketenagakerjaan. *Jurnal Inovasi Industri*.
- Simanungkalit, E. (2020). Pengaruh inflasi terhadap produk domestik bruto (PDB). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.

- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Utami, R. (2024). Analisis spasial ketimpangan kesejahteraan antar-kecamatan dan distribusi infrastruktur daerah. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 10(3), 245–260.
- Wahyudi, I., Supriadi, D., & Sari, N. (2023). Analisis struktural indeks pembangunan manusia terhadap ketahanan ekonomi jangka pendek. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara*, 7(4), 201–215.
- Wibowo, T., Santoso, B., & Laksmi, R. (2022). Dampak pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 17(1), 65–76.
- Wulandari, dkk. (2023). Kapasitas modal manusia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang. *Jurnal Human Capital*.
- Yuliana, S., Nugraha, P., & Hadi, S. (2024). Analisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 9(1), 101–113.
- Yusuf, M., & Hamzah, A. (2022). Elastisitas konsumsi rumah tangga terhadap transmisi inflasi di pasar tradisional. *Journal of Applied Economics*, 17(1), 55–72.
- Zulkarnain, I. (2023). Tantangan pembangunan manusia dan capaian angka harapan hidup di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Laporan Tahunan Ekonomi Regional*. Badan Pusat Statistik.